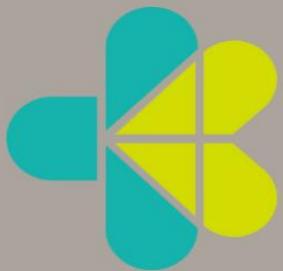


# LAPORAN TAHUNAN



*Pusat Pelatihan SDM Kesehatan*  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Unit Eselon 2 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021.

Dengan tersusunnya laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tahun 2021. Selanjutnya laporan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian target output, penyerapan/realisasi dana dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini, karena itu masukan dan saran kami harapkan demi penyempurnaannya.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan



**Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes**  
NIP. 196504181989032002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN.....	1
A. Hambatan pada Tahun 2019 .....	1
B. Kelembagaan .....	2
C. Sumber Daya .....	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA .....	9
A. Dasar Hukum.....	9
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	10
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN.....	11
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	11
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi.....	12
C. Terobosan yang Dilakukan.....	12
BAB IV HASIL KERJA .....	14
A. Target dan Sasaran Kinerja.....	14
B. Pencapaian Kinerja.....	14
C. Realisasi Anggaran.....	27
BAB V PENUTUP .....	31
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN**

Pada tahun 2021 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Permenkes Nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun hambatan yang terjadi di tahun 2020 adalah:

#### **A. Hambatan Pada Tahun 2020**

Hambatan yang dihadapi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Pandemi tahun kedua mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya khususnya di triwulan III saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- b) Proses internalisasi dan penyusunan awal cetak biru Cooperative University yang masih membutuhkan dukungan khususnya dari pimpinan di lingkungan Kemenkes;
- c) Telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan yang di dalamnya tercantum ketentuan tentang proses dan siklus manajemen pelatihan bagi tenaga kesehatan, namun peraturan turunan terkait penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan masih mengacu pada Kepmenkes Nomor 725 tahun 2003 dan peraturan turunan masih dalam proses penyusunan;
- d) Kepastian pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama masih bergantung pada Biro Kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tahun pertama Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang membutuhkan penyesuaian dalam mekanisme/tata cara revisi anggaran sehingga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi tidak optimal;

## **B. Kelembagaan**

### **a) Tugas Dan Fungsi**

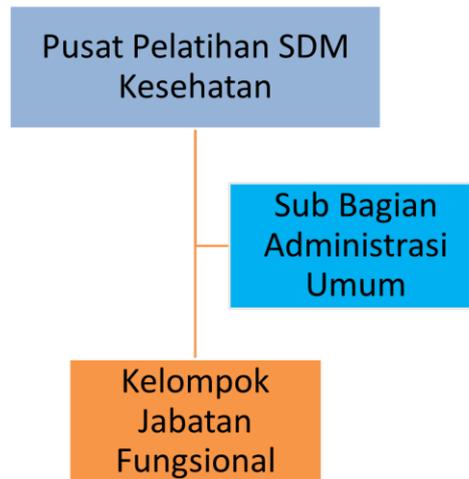
Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia Kesehatan. Dalam mendukung tugas tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
4. pelaksanaan urusan administrasi Pusat

Peran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi.

Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal.

Mengacu pada Permenkes Nomor 25 tahun 2020 dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki pengelompokan uraian fungsi melalui 3 (tiga) kelompok substansi sebagai berikut:

- 1) Kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan terdiri atas:
  - a) Kelompok sub-substansi analisis kompetensi. Kelompok sub-substansi analisis kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
  - b) Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan. Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi

sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan.

2) Kelompok substansi pengembangan pelatihan. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan pelatihan terdiri atas:

a) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis.

Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi.

b) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional.

Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3) Kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan terdiri atas:

a) Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan. Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

b) Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan. Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

### C. Sumber Daya

#### a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 berjumlah 73 orang PNS dan 17 orang PPNPN dan 2 (dua) orang tenaga alihdaya dengan rincian sebagai berikut :

##### 1) Berdasarkan Jabatan

Dari 73 orang pegawai PNS Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari 2 orang jabatan struktural (Kepala Pusat dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum), 32 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), dimana 9 (sembilan) orang merupakan penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional tertentu. Selain jabatan struktural dan fungsional tertentu, terdapat 39 orang jabatan fungsional umum (JFU). Adapun jenis JFT yang ada di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

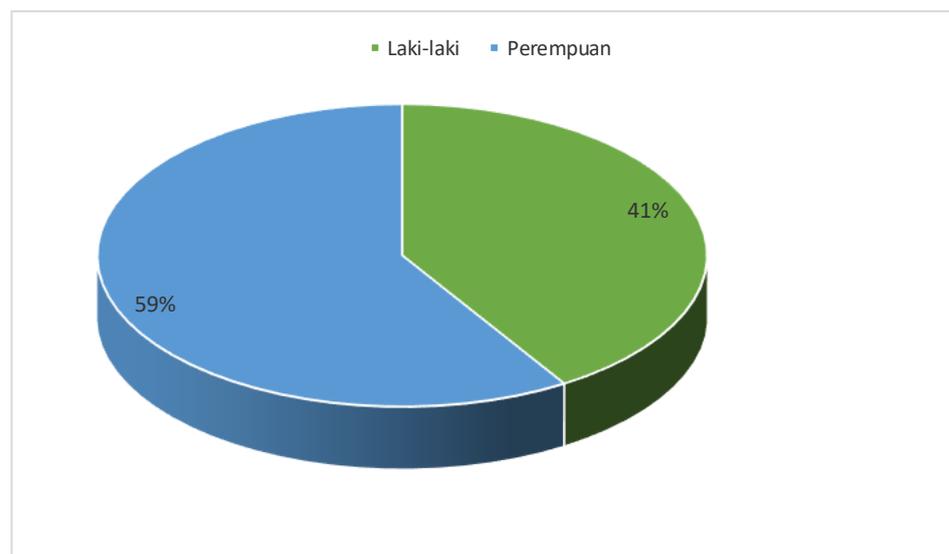
No.	Jenis JFT	Jumlah
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6
4	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
5	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2
6	Analisis Pengelola APBN Muda	2
7	Analisis Pengelola APBN Pertama	1
8	Arsiparis Ahli Muda	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	1
10	Arsiparis Mahir	1
11	Asesor SDM Ahli Madya	1
12	Asesor SDM Ahli Muda	2
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>

Pada tahun 2021 terdapat 39 orang yang masih menduduki jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis JFU	Jumlah
1	Analisis Data dan Informasi	16
2	Arsiparis/Pranata Kearsipan	14
3	Pengelola BMN	1
4	Analisis Kebijakan	1
5	Analisis Keuangan	1
6	Pengadministrasi umum	1
7	Pengelola Data	1
8	Asesor Analisis Kompetensi	3
9	Perencana	1
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>

## 2) Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah SDM pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :



Data Pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	30	41%
2.	Perempuan	43	59%
	<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>

3) Berdasarkan Golongan Ruang/Kepangkatan :

Berdasarkan golongan ruang/kepangkatan, pegawai di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 didominasi oleh golongan III sebanyak 51 orang, diikuti oleh golongan IV sebanyak 13 orang, sisanya golongan II sebanyak 8 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang.

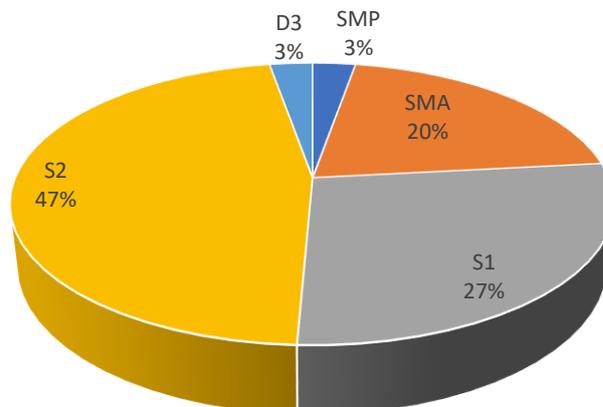
Jumlah Pegawai Menurut Golongan/ Ruang Kepangkatan

Golongan	Pangkat	Jumlah
I/c	Juru	1
II/c	Pengatur	1
II/d	Pengatur Tk. I	7
III/a	Penata Muda	6
III/b	Penata Muda Tk. I	20
III/c	Penata	12
III/d	Penata Tk. I	13
IV/a	Pembina	10
IV/b	Pembina Tk. I	2
IV/d	Pembina Utama Muda	1
<b>Total</b>		<b>73</b>

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Berdasarkan tingkat pendidikan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didominasi oleh latar belakang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 34 orang pegawai (47%), diikuti Sarjana (S-1) sebanyak 20 orang (27%). Sebaran pegawai Pusat Pelatihan berdasarkan tingkat pendidikan digambarkan dalam grafik di bawah ini:

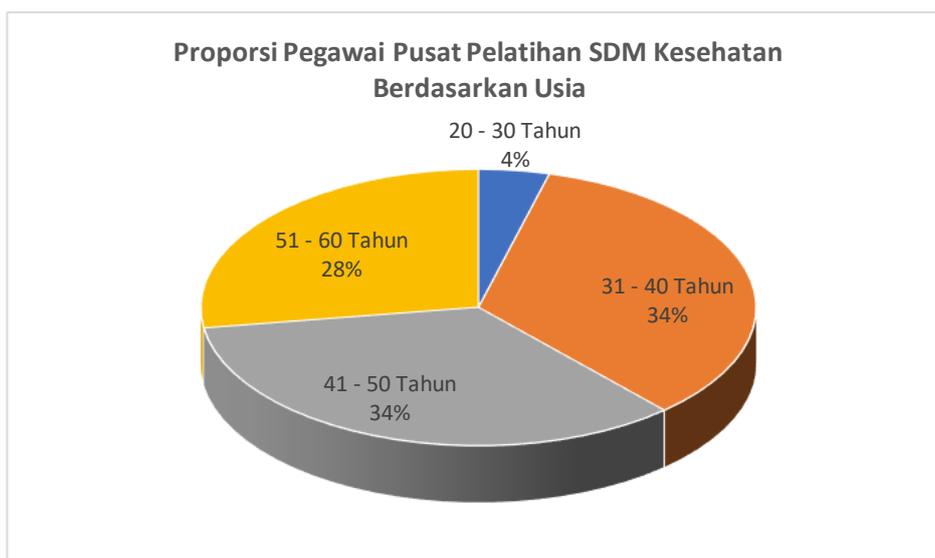
Proporsi Jumlah Pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



5) Berdasarkan Usia :

Dari total 73 orang pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, persebaran menurut usia tersebar rata sebagaimana dijabarkan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

No.	Usia	Jumlah
1	20 - 30 Tahun	3
2	31 - 40 Tahun	25
3	41 - 50 Tahun	25
4	51 - 60 Tahun	20
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>



**b) Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020 didukung oleh adanya sarana dan prasarana pendukung. Dalam Laporan SIMAK BMN Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 jumlah neraca senilai Rp 1.266.124.062 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu enam puluh dua rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai barang konsumsi, peralatan dan mesin, dan software (data SIMAK BMN Tahun 2021 terlampir).

**c) Anggaran**

Pembiayaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. DIPA awal satker Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang sebesar Rp. 43.587.607.000 setelah terjadi efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2021, sehingga pagu satker Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp. 27.136.225.000-

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN KERJA**

#### **A. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

## **B. Sasaran dan Indikator**

- Sasaran

Sasaran strategis dari Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2020 adalah Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan terakreditasi.

- Indikator

Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah

1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan terakreditasi sebanyak 15.272 orang.
2. Jumlah NSPK Terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun sebanyak 20 NSPK

## **BAB III**

### **STRATEGI PELAKSANAAN**

#### **A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dijelaskan bahwa Strategi Badan PPSDM Kesehatan dalam upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan, melalui :

1. Pemenuhan SDM
2. Pemerataan SDM
3. Peningkatan Mutu SDM

Strategi Badan PPSDM Kesehatan di atas didukung oleh peran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang diimplementasikan melalui upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dengan pelatihan, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam RAK tersebut dijabarkan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai berikut:

1. Tersedianya peta dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional kesehatan maupun non kesehatan dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, dan pengendalian penyakit)
2. Berkembangnya metode dan teknologi pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan perkembangan revolusi industri 4.0 melalui pengembangan Latihan Jarak Jauh (LJJ) dan *e-learning*
3. Terselenggaranya sistem pembelajaran terintegrasi melalui integrasi *learning management system (LMS)* dan *Learning resources center* pelatihan SDM Kesehatan dan pengembangan *Coorporate University*
4. Terbinanya institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan melalui perluasan sasaran akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan, audit mutu eksternal institusi pelatihan bidang kesehatan dan integrasi data sumberdaya institusi
5. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kesehatan sesuai standar ketentuan yang berlaku dan penjaminan mutu berbasis teknologi dan informasi

## B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Pada tahun 2021, masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2021 untuk refocusing dan penanggulangan COVID-19, dimana pagu Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan awalnya adalah sebesar Rp. 43.507.687.000,-, namun alokasi anggaran tersebut kemudian mengalami efisiensi, dimana pagu Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pasca efisiensi menjadi Rp. 27.136.225.000,-. Efisiensi anggaran tersebut juga berpengaruh terhadap beberapa target output yang ikut berkurang;
- b. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan di masa pandemi, dari klasikal (tatap muka) menjadi daring, sehingga beberapa penyelesaian kegiatan seperti penyusunan NSPK menjadi terkendala dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- c. Pelaksanaan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran tahun pertama menyebabkan banyak penyesuaian khususnya dalam pelaksanaan revisi. Revisi POK akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai mengakibatkan rencana penarikan dana sehingga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021 tidak optimal;

## C. Inovasi yang Dilakukan

Sebagai upaya pencapaian sasaran program Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. Menyusun *grand design* serta *blueprint Corporate University* (Corpu) Kementerian Kesehatan. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga telah menyusun *road map* Corpu Kemenkes sampai dengan tahun 2024, serta menyusun *grand design* awal Corpu sehingga arah menuju transformasi Corpu menjadi lebih terarah dan konsisten.
2. Pengembangan sistem informasi sertifikat pelatihan bidang kesehatan (aplikasi e-sertifikat pelatihan). Output dari sistem informasi ini adalah digitalisasi sertifikat pelatihan bidang Kesehatan, yang nantinya akan ditandatangani secara digital dan diterima oleh peserta latih dalam bentuk elektronik. Selain itu, database peserta latih khususnya tenaga Kesehatan dari seluruh Indonesia nantinya diharapkan akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDM).

Hal ini akan mempermudah analisis capaian indikator kinerja program Badan PPSDM Kesehatan serta indikator kinerja kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ke depannya serta dapat memberikan masukan dalam kebijakan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.

3. Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi Institusi (SIAKSI), yang nantinya akan mempermudah proses pembinaan institusi pelatihan bidang Kesehatan yang telah terakreditasi melalui audit mutu eksternal, fasilitasi insititusi yang akan direakreditasi maupun yang akan dilakukan penilaian akreditasi untuk pertama kali karena dilakukan secara daring. Data-data terkait sumber daya institusi pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi nantinya juga berada di dalam database sistem informasi ini.
4. Penyusunan media /bahan ajar pembelajaran yang dikhususkan untuk pelatihan jarak jauh, baik untuk pelatihan teknis maupun jabatan fungsional kesehatan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelatihan.

## BAB IV HASIL KERJA

### A. Target dan Sasaran Kinerja

Untuk mencapai kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat di Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2021, serta Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021, berikut disampaikan target, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai Tahun 2021

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen non Kesehatan terakreditasi (orang)	24,070	15,272	22,800	22,800	22,800
		Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	15	20	20	20	20

### B. Pencapaian Kinerja

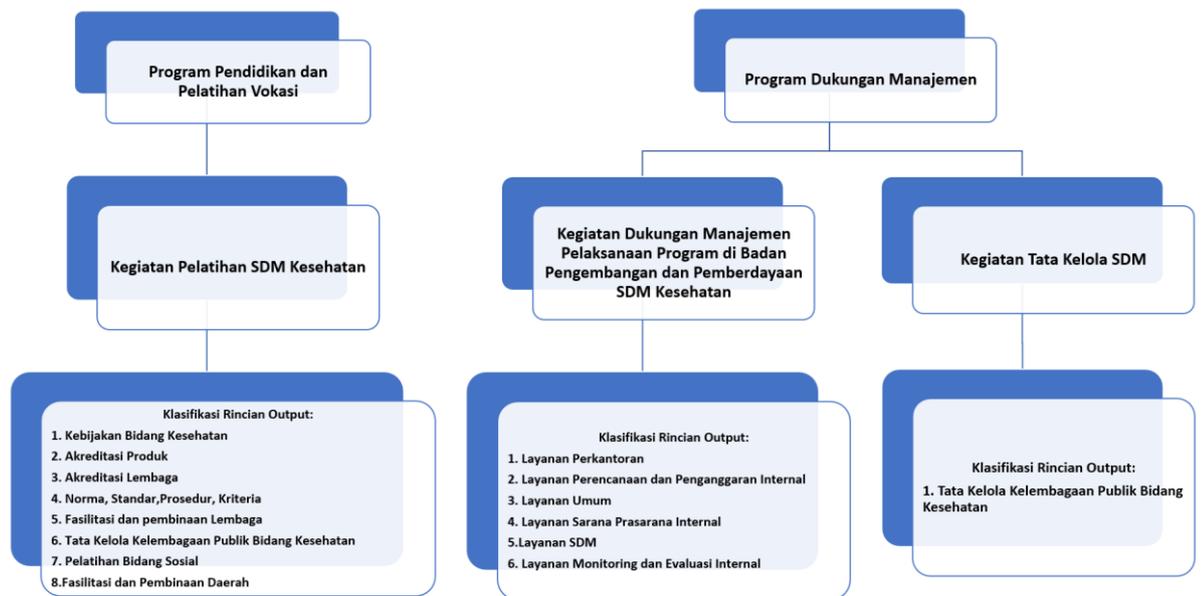
#### 1. Hasil Capaian Kinerja

Untuk mendukung sasaran kinerja Renstra Kemenkes maka kegiatan yang mendukungnya terbagi dalam dengan rencana tingkat capaian berdasarkan penetapan kinerja setelah revisi DIPA adalah sebagai berikut :

## 2. Capaian Output Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021

Pada tahun 2021, dalam rangka mencapai target kinerja output, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjalankan 2 (dua) program, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 15 KRO yang mendukung pencapaian indikator kinerja pelatihan SDM Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjalankan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terdiri dari kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, selain itu terdapat Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan Kegiatan Tata Kelola SDM, yang secara rinci tergambar dalam grafik di bawah ini:



Adapun rincian pelaksanaan dan capaian output dari masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, terdiri dari 8 (delapan) KRO:
  - a) Kebijakan Bidang Kesehatan

Output ini memiliki 2 (dua) target yaitu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Standar Kompetensi Teknis (SKT) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

b) Akreditasi Produk

Salah satu fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki target 500 pelatihan yang diakreditasi. Adapun proses pengajuan, penilaian dan penerbitan surat keterangan akreditasi pelatihan dilakukan oleh Tim Penilai melalui Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIKPEL). Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah melakukan akreditasi sebanyak 1.720 pelatihan, sehingga persentase capaian pada output ini sebesar 326%.

Dalam upaya menjaga kualitas pelatihan yang diselenggarakan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan yang sedang berlangsung, baik pelatihan yang dilaksanakan oleh unit program, dinas kesehatan provinsi maupun pihak swasta, untuk memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai standar yang telah disetujui dalam proses akreditasi pelatihan. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan baik secara daring maupun tatap muka, dimana hasilnya akan menjadi bahan masukan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam menyusun kebijakan selanjutnya terkait perbaikan penyelenggaraan pelatihan.

**Rincian Jenis Pelatihan Terakreditasi Tahun 2021**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Pelatihan Terakreditasi
1	Jabatan Fungsional Kesehatan	362
2	Manajemen Kesehatan	118
3	Manajemen Non Kesehatan	17
4	Teknis Profesi Kesehatan	705
5	Teknis Program Kesehatan	113
6	Teknis Umum/Administrasi & Manajemen	2
7	Teknis Upaya Kesehatan	403
<b>Jumlah</b>		<b>1720</b>

c) Akreditasi Lembaga

Pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengacu pada fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Hal ini juga didukung oleh Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 250/K.1/PDP.09/2016 yang memberikan wewenang pada Badan PPSDM Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai lembaga pengakreditasi diklat teknis dan fungsional Kesehatan sampai dengan Tahun 2021 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2026 melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan secara aktif melakukan penjaminan mutu institusi diklat bidang kesehatan melalui akreditasi institusi diklat, baik institusi diklat yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, sampai dengan rumah sakit dan swasta. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah melakukan penilaian akreditasi terhadap 15 institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, baik penilaian akreditasi awal, yang artinya instansi penyelenggara pelatihan baru pertama kali melewati penilaian akreditasi, maupun re-akreditasi instansi penyelenggara pelatihan yang akan habis masa berlaku akreditasinya.

Adapun rincian institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang diakreditasi tahun 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA INSTITUSI	STATUS AKREDITASI
1	Bapelkes Provinsi Aceh	B
2	Bapelkes Provinsi Sumatera Utara	B
3	Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara	B
4	Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah	B
5	Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan	B
6	Bapelkes Provinsi Maluku	B
7	Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur	B
8	Bapelkes Provinsi Sulawesi Tenggara	B
9	Bapelkes Provinsi Sumatera Barat	B
10	Siloam Training Centre	B
11	RSUP Hasan Sadikin	A
12	Hermina Learning Centre	B
13	RS Cicendo	B
14	PT. Bunda Medik Healthcare System Diklat Indonesia	B
15	Balai Pelatihan Kesehatan Papua	C

d) Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

Dalam menjalankan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pada tahun 2021 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyusun NSPK yang terdiri dari kurikulum, rancangan kurikulum, modul, media dan bahan ajar, petunjuk teknis serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.

Adapun rincian NSPK yang telah disusun tahun 2021 oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penilaian Kompetensi
- 2) Revisi Pedoman Training Need Assesment
- 3) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Jabatan Fungsional Bidan
- 4) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Jabatan Fungsional Perawat
- 5) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut
- 6) Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker
- 7) Kurikulum Pelatihan Perkesmas bagi Koordinator Perkesmas
- 8) Kurikulum Training Of Trainer (ToT) Perawat Kesehatan Masyarakat
- 9) Kurikulum Pelatihan Kesehatan Haji Masa Pandemi Covid

- 10) Kurikulum Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FKTP
- 11) Kurikulum TOT Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FKTP
- 12) Kurikulum LJJ Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
- 13) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
- 14) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
- 15) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 16) Modul Pelatihan Perkesmas bagi Koordinator Perkesmas
- 17) Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- 18) Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker
- 19) Modul LJJ Tim Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
- 20) Pedoman Pengembangan Latihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan
- 21) Evaluasi Program Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Vaksinator
- 22) Evaluasi Program Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Berbasis One Health
- 23) Evaluasi Program Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas
- 24) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Bidan
- 25) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Perawat
- 26) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut
- 27) Training Need Assesmen di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes
- 28) Revisi Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan
- 29) Pedoman Pengendali Pelatihan Bidang Kesehatan
- 30) Revisi Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan
- 31) Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan
- 32) Pedoman Akreditasi Institusi
- 33) Instrumen Akreditasi Institusi
- 34) Pedoman Audit Mutu Internal
- 35) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
- 36) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
- 37) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 38) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)
- 39) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan
- 40) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Penguji Uji Kompetensi (2 Media)
- 41) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Bidan (2 Media)
- 42) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Perawat (2 Media)
- 43) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut ( 2 Media)
- 44) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Building Learning Commitment
- 45) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Anti Korupsi

- 46) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Tenaga Pelatih Kesehatan (2 Media)
- 47) Media Pembelajaran Pelatihan EKG-AED bagi Dokter Keluarga
- 48) Media dan Bahan Ajar Kebijakan Pelatihan Teknis Kesehatan
- 49) Media dan Bahan Ajar Penyusunan Kurikulum Pelatihan
- 50) Media e-learning EKG-AED bagi Dokter Keluarga

e) Pelatihan Bidang Sosial

Untuk melaksanakan KRO ini, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melakukan Workshop Pengembangan SDM Kesehatan, dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan.

Pada Tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melakukan upaya pengembangan kompetensi baik secara daring maupun luringm dalam bentuk workshop terkait Dokter Keluarga, webinar Update Tatalaksana COVID-19, workshop penyelenggaraan pelatihan nusantara sehat/relawan, workshop/pelatihan teknis terkait COVID-19, Workshop fasilitator pelatihan kesehatan haji di masa pandemi, workshop medical evacuation bagi relawan COVID-19 yang mencapai 925 orang.

Selain workshop pelatihan teknis terkait, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melaksanakan Pelatihan BTCLS bagi Dokter yang ada di RSDC Wisma Atlet yang mencapai 125 orang.

Adapun rincian pelaksanaan workshop dan pelatihan penugasan non reguler bidang kesehatan sebagai berikut:

No.	Judul Workshop	Capaian Peserta	Metode
1	Workshop Fasilitator Pelatihan Dokter Keluarga	50	Luring
2	Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Nusantara Sehat/Relawan	100	Luring
3	Workshop Fasilitator Pelatihan Pelayanan Kesehatan Haji Di Masa Pandemi Covid19	100	Daring
4	Workshop Fasilitasi Kurikulum	50	Luring
5	Workshop Medical Evacuation Bagi Relawan Covid19	50	Luring
6	Workshop Fasilitasi Latsar Cpns	30	Daring
7	Workshop Analisa/Cleaning Data Pis-Pk	42	Luring
8	Webinar Update Tatalaksana Covid-19 Bagi Dokter Di Rumah Sakit	400	Daring
9	Workshop Tracer Covid19 Bagi Babinsa (TNI),	1000	Daring
10	Workshop Tracer Covid19 Bagi Babinkamtibmas (Polri),	200	Daring
11	Workshop Tracer Covid19 Bagi Relawan Poltekkes,	57	Daring
12	Workshop ICU Dasar Bagi Dokter dan Perawat di RSDC Wisma Atlet,	400	Daring
13	Workshop Call center bagi Relawan,	100	Daring
14	Workshop Tracer Bagi SBH ,	300	Daring
15	Pelatihan BTCLS bagi Perawat di RSDC Wisma Atlit	75	Luring
16	Pelatihan ACLS bagi Dokter di RSDC Wisma Atlit	50	Luring
17	Workshop MEDical Evacuation	50	Luring
18	Workshop Fasilitator Tracer	300	Daring
19	Workshop Tatalaksana Vaksinasi Covid-19 bagi Vaksinator Provinsi Kalimantan Timur	100	Daring
<b>TOTAL</b>		<b>3454</b>	

f) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan

Pada KRO ini kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah asesmen yang menggunakan anggaran bersumber dana PNBPN. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada Tahun 2021 telah melaksanakan asesmen untuk para pegawai RSUP Fatmawati sebanyak 50 orang menggunakan metode Asesmen Center dengan Psikometri yang dapat memberikan gambaran baik potensi maupun kompetensi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memetakan pegawai di lingkungan RSUP Fatmawati.

g) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan, serta tugas dalam pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Mengacu pada tugas tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

melakukan fasilitasi dan pembinaan pada lembaga institusi pelatihan terkait penyelenggaraan pelatihan dasar (Latsar) dan pelatihan kepemimpinan di UPT Bidang Pelatihan Kesehatan serta pembinaan dan fasilitasi bagi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.

Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap 6 (enam) UPT yang terdiri dari 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Ciloto dan Makassar serta 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang, Semarang dan Batam terkait penyelenggaraan pelatihan dasar (Latsar) CPNS dan pelatihan kepemimpinan.

Selain itu, pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga telah melakukan pembinaan melalui audit mutu eksternal serta fasilitasi akreditasi terhadap 27 institusi pelatihan bidang kesehatan sebagai berikut:

1. AGD Dinkes Prov. DKI Jakarta,
2. Bapelkes Cikarang,
3. Yayasan AGD 118,
4. Wocare,
5. Pro Emergency,
6. Bapelkes Provinsi Jawa Tengah,
7. Bapelkes Provinsi D.I. Yogyakarta,
8. Gadar Medik
9. Bapelkes Provinsi Riau,
10. Bapelkes Provinsi. Jambi,
11. Bapelkes Provinsi. Bengkulu,
12. UPT Latkesmas Murnajati,
13. UPT Latnakes Kupang,
14. Bapelkes Provinsi Kalimantan Barat,
15. Bapelkes Provinsi Bali,
16. Bapelkes Batam,
17. RSUD Margono,
18. RSJP Harapan Kita,
19. BBPK Jakarta,

20. PPKC
  21. RSUP Hasan Sadikin
  22. RS Cicendo
  23. RSUP M. Djamil
  24. RSUP M. Hoesin
  25. RSAB Harapan Kita
  26. RSUP Persahabatan
  27. RS Pusat Otak Nasional
- h) Fasilitas dan Pembinaan Daerah
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/221/2016 tentang Pembina, Pendamping dan Koordinator, serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam rangka percepatan indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan program prioritas nasional, pada keputusan tersebut Menteri Kesehatan juga telah menetapkan pembina wilayah, pendamping pembina wilayah, koordinator penyiapan bahan dan kunjungan lapangan serta pendukung pembina wilayah di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Kepmenkes tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan diberikan tugas sebagai koordinator wilayah untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tugas dan tanggung jawab Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai Koordinator Pembinaan Wilayah Sulawesi Tenggara diantaranya adalah membantu mempersiapkan materi terkait kunjungan yang akan dilaksanakan unit teknis, membantu mempersiapkan kunjungan lapangan dan berkoordinasi terkait dengan penyiapan rekomendasi dan laporan hasil kunjungan yang dilakukan. Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga menjadi Koordinator pelaksanaan vaksinasi di daerah Sulawesi Tenggara, baik pada pelaksanaan vaksinasi, pelatihan vaksinator, serta pendistribusian vaksin yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.

2) Kegiatan Tata Kelola SDM Kesehatan terdiri dari 1 (satu) KRO :

a) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah mengamanahkan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 JP/tahun. Pengembangan kompetensi yang diberikan kepada para PNS pun harus sesuai dengan arah kebijakan dan kebutuhan organisasi sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, pengembangan kompetensi harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi. Hal ini diperkuat melalui PP No 17 tahun 2020 bahwa pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*).

Sejak tahun 2020, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menginisiasi proses terbentuknya *Corporate University* Kementerian Kesehatan termasuk menyusun peta jalan (*road map*). Pada tahun 2021 pelaksanaan kegiatan difokuskan kepada grand design Sistem Informasi *Corporate University*, studi banding secara daring kepada lembaga BUMN/kementerian/lembaga yang telah menerapkan *Corporate University* serta melaksanakan workshop penguatan *Corporate University* untuk lebih menginternalisasi konsep *Corporate University* kepada seluruh elemen Kementerian Kesehatan. Hasil Grand design sistem informasi *Corporate University* ini nantinya akan menjadi acuan di tahun 2022 dalam mewujudkan *Corporate University*.

3) Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 6 (enam) KRO :

a) Layanan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran berkaitan dengan penunjang keperluan perkantoran di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Output yang dihasilkan berupa tercapainya seluruh keperluan perkantoran di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan diantaranya adalah Medical Check Up Pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, terpenuhinya peralatan perkantoran pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, serta perjalanan dinas yang diperlukan oleh Pimpinan.

b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Kegiatan pada tahun 2021 berkaitan dengan penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada output ini menghasilkan keluaran berupa dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

c) Layanan Umum

Pelaksanaan kegiatan pada output ini di tahun 2021 terkait pengelolaan arsip baik statis maupun dinamis, penyusutan arsip, pengelolaan Gerakan Kantor Berhias, pengelolaan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) serta perjalanan pendampingan pimpinan dalam rangka penugasan.

d) Layanan Sarana Internal

Kegiatan pada Layanan Sarana Internal merupakan salah satu upaya Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam menunjang sarana prasarana yang digunakan oleh Pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi terlebih lagi dikarenakan masa pandemi yang mewajibkan semua pegawai tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat melaksanakan Work From Home (WFH).

Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengadakan perlengkapan untuk menunjang hal tersebut dengan rincian :

1. Laptop sebanyak (41 Unit)
2. PC all in one sebanyak (4 unit)
3. Camera Video Conference (4 Unit)
4. Fast Scanner (2 Unit)
5. Printer all in one (14 Unit)
6. Tablet dan Keyboard (1 unit)
7. Proyektor (1 unit)

Selain itu Sarana untuk perlengkapan menunjang tugas dan fungsi, dilakukan juga penambahan prasarana terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan pada ruang studio dan ruang video conference berupa meubelair serta rak arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip di lingkungan Pusat Pelatihan SDM kesehatan.

e) Layanan SDM

- Layanan Kepegawaian

Pelaksanaan kegiatan rutin terkait pengelolaan kepegawaian Pusat Pelatihan SDM Kesehatan seperti Penilaian Sasaran Kerja Pegawai, Monitoring dan Evaluasi Standard Operating Procedure (SOP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Usulan Pengangkatan Jabatan Fungsional, Usulan dan Pensiun Pegawai, Verifikasi dan Validasi My SAPK pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan Pegawai serta Peningkatan Kompetensi Pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui workshop dan pelatihan serta pelaksanaan Test Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

- Layanan Asesmen SDM Kesehatan

Kegiatan pada layanan asesmen adalah pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi SDM Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik pada seleksi jabatan tinggi pratama maupun madya Kementerian Kesehatan, seleksi pemilihan direktur Poltekkes Kemenkes serta penilaian potensi dan kompetensi pada pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan nasional, administrator dan pengawas serta rapid asesmen pegawai Kemenkes.

Kegiatan tersebut merupakan tugas Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan. Rincian capaian output pada Layanan Asesmen SDM Kesehatan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Jenis Asesmen	Capaian Peserta (orang)
1	Pelatihan Dasar CPNS	1.932
2	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	29
3	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	21
4	Pegawai Poltekkes Jakarta III	105
5	Asesmen Pegawai RSUP Fatmawati	50
6	Seleksi Calon Direktur Poltekkes	30
7	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	60
8	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	27
9	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	37
10	Rapid Assesment Pegawai Kemenkes	3.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.291</b>

f) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Kegiatan pada komponen ini terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Keluaran dari kegiatan ini di tahun 2021 adalah Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 serta hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 serta pelaksanaan kegiatan rutin pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan SIMAK dengan keluaran Laporan Keuangan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan semester 1 dan 2 Tahun 2021.

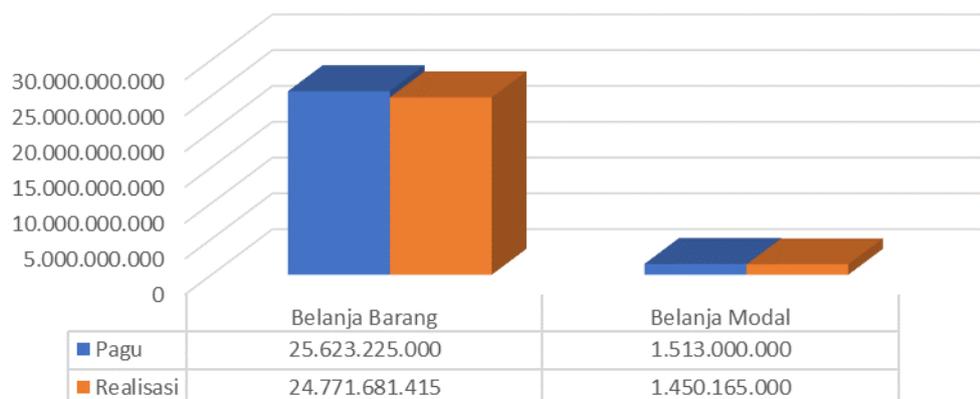
**C. Realisasi Anggaran**

**1. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

Jika berdasarkan jenis belanja, pagu belanja modal pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.513.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.450.165.000 (95,8%), anggaran belanja modal tersebut dialokasikan untuk pengadaan/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan alat pengolah data (laptop, PC, Printer, scanner, Kamera Video Conference)
- 2) Peralatan perkantoran (meja kerja studio, lemari arsip dan filling cabinet)
- 3) Pengembangan aplikasi e-Sertifikat
- 4) Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pelatihan (SIBULAT)

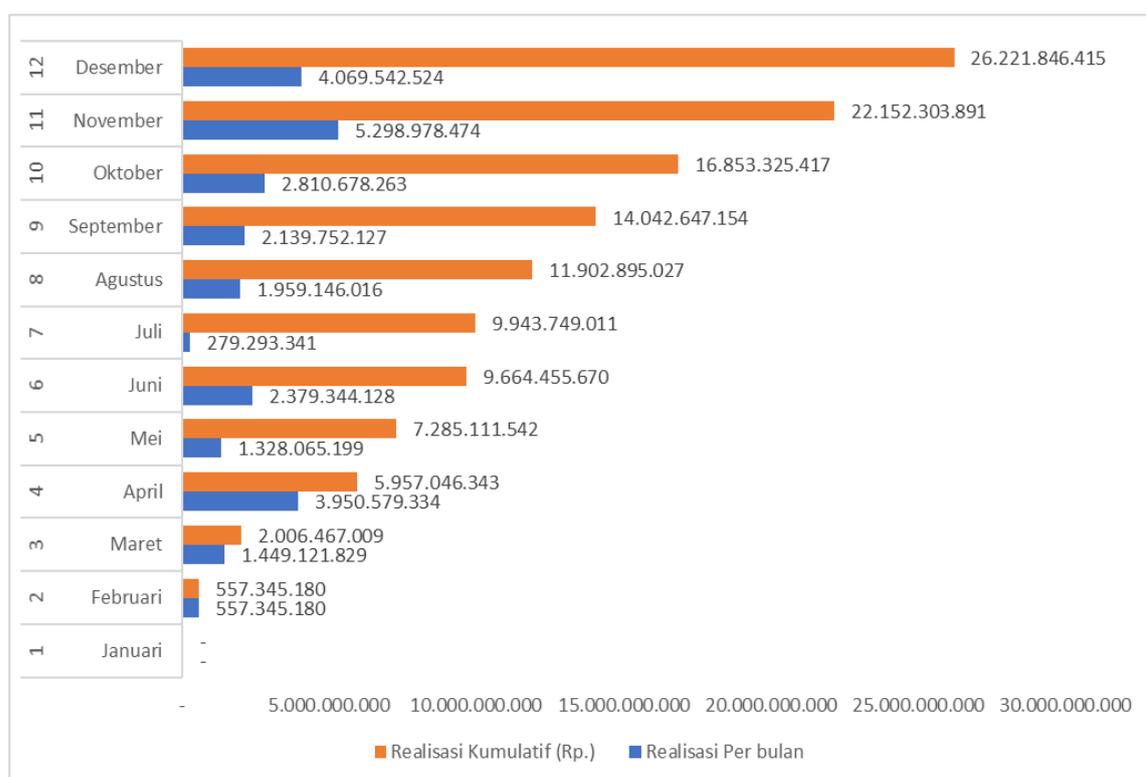
Sedangkan pagu belanja barang Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp. 25.623.225.000. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan jenis belanja tergambar dalam grafik di bawah ini:



### Data Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Belanja Barang	25.623.225.000	24.771.681.415	96,68
2.	Belanja Modal	1.513.000.000	1.450.165.000	95,85
	<b>JUMLAH</b>	<b>27.136.225.000</b>	<b>26.221.846.415</b>	<b>96,63</b>

Pada realisasi anggaran di atas merupakan realisasi netto, sedangkan realisasi bruto sebesar Rp. 26.276.551.376 (96,83%) dimana terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 54.704.961. Tren realisasi anggaran per bulan dan kumulatif terlihat dalam grafik di bawah ini:



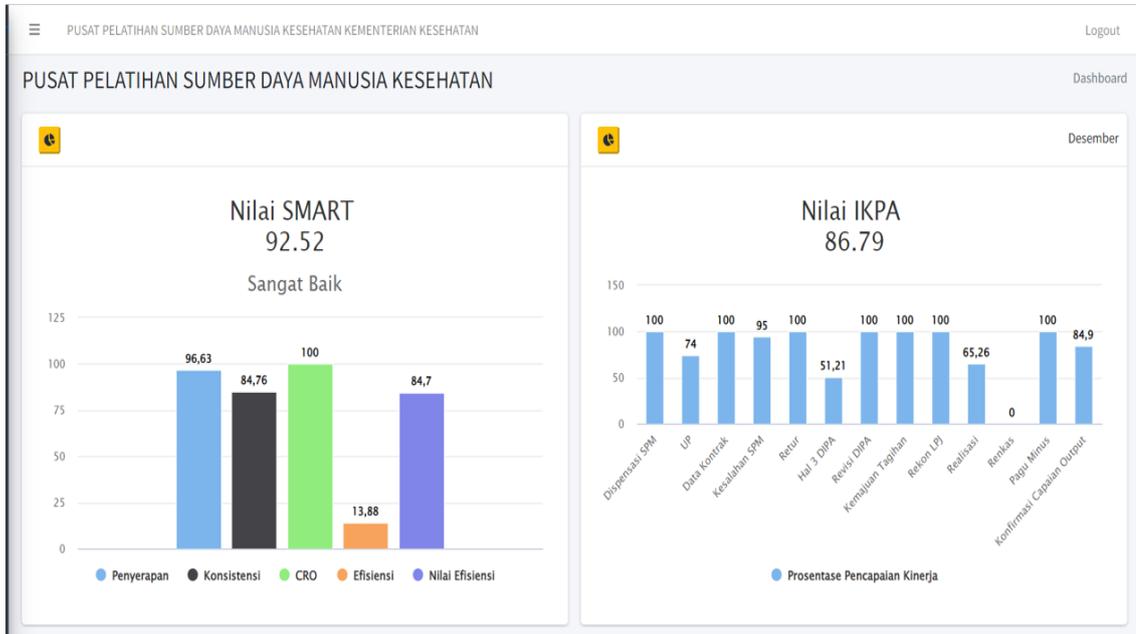
## 2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2021 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebesar Rp. 43.507.687.000,-. Alokasi anggaran tersebut kemudian mengalami efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat) kali untuk penanggulangan COVID-19 dan refocussing anggaran, sehingga pagu Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp. 27.136.225.000, dengan realisasi sebesar Rp. 26.221.846.415. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rincian output, maka rincian realisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dapat terlihat di tabel di bawah ini:

No.	Kode   Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian
<b>I</b>	<b>2076   Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>17.441.632.000</b>	<b>16.728.550.014</b>	<b>95,91%</b>		
1	2076ABG   Kebijakan Bidang Kesehatan	377.817.000	359.853.589	95,25%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
2	2076ADB   Akreditasi Produk	928.210.000	916.166.792	98,70%	500 Produk	1720 Produk
3	2076ADE   Akreditasi Lembaga	1.032.990.000	928.652.674	89,90%	19 Lembaga	16 Lembaga
4	2076AFA   Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12.734.081.000	12.250.442.294	96,20%	49 NSPK	56 NSPK
5	2076BDB   Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	366.990.000	352.128.510	95,95%	33 Lembaga	34 Lembaga
6	2076BGD   Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	48.624.000	42.572.500	87,55%	1 Lembaga	1 Lembaga
7	2076DCJ   Pelatihan Bidang Sosial	1.898.140.000	1.828.952.710	96,35%	725 Orang	3454 Orang
8	2076FBA   Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	54.780.000	49.780.945	90,87%	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)
<b>II</b>	<b>4399   Tata Kelola SDM</b>	<b>1.430.810.000</b>	<b>1.428.697.935</b>	<b>99,85%</b>		
1	4399BGD   Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1.430.810.000	1.428.697.935	99,85%	1 Lembaga	1 Lembaga
<b>III</b>	<b>4817   Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>8.263.783.000</b>	<b>8.119.303.427</b>	<b>98,25%</b>		
1	4817EAA   Layanan Perkantoran	2.546.416.000	2.536.477.438	99,61%	1 Layanan	1 Layanan
2	4817EAB   Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	685.156.000	676.415.209	98,72%	1 Layanan	1 Layanan
3	4817EAC   Layanan Umum	894.560.000	859.105.968	96,04%	1 Layanan	1 Layanan
4	4817EAD   Layanan Sarana Internal	1.213.000.000	1.203.620.000	99,23%	50 unit	50 unit
5	4817EAF   Layanan SDM	2.675.468.000	2.606.528.794	97,42%	3090 Orang	5381 Orang
6	4817EAL   Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	249.183.000	237.156.018	95,17%	1 Layanan	1 Layanan
	<b>Total</b>	<b>27.136.225.000</b>	<b>26.221.846.415</b>	<b>96,63%</b>		

### 3. Dashboard E-Money SMART DJA

Nilai kinerja anggaran (NKA) serta nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan aplikasi SMART DJA terlihat dalam grafik di bawah ini:



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan ini merupakan laporan singkat pelaksanaan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 yang dalam evaluasinya mengacu pada rencana aksi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 2020-2024.

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 96,63% dengan capaian output sebesar 100%. Meskipun metode pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 masih didominasi secara daring, namun volume keluaran dapat tercapai khususnya penyusunan NSPK dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang ditemui selain perubahan metode pelaksanaan juga adanya efisiensi anggaran untuk penanggulangan COVID-19, namun target kinerja yang sudah ditetapkan sebagian besar dapat tercapai.

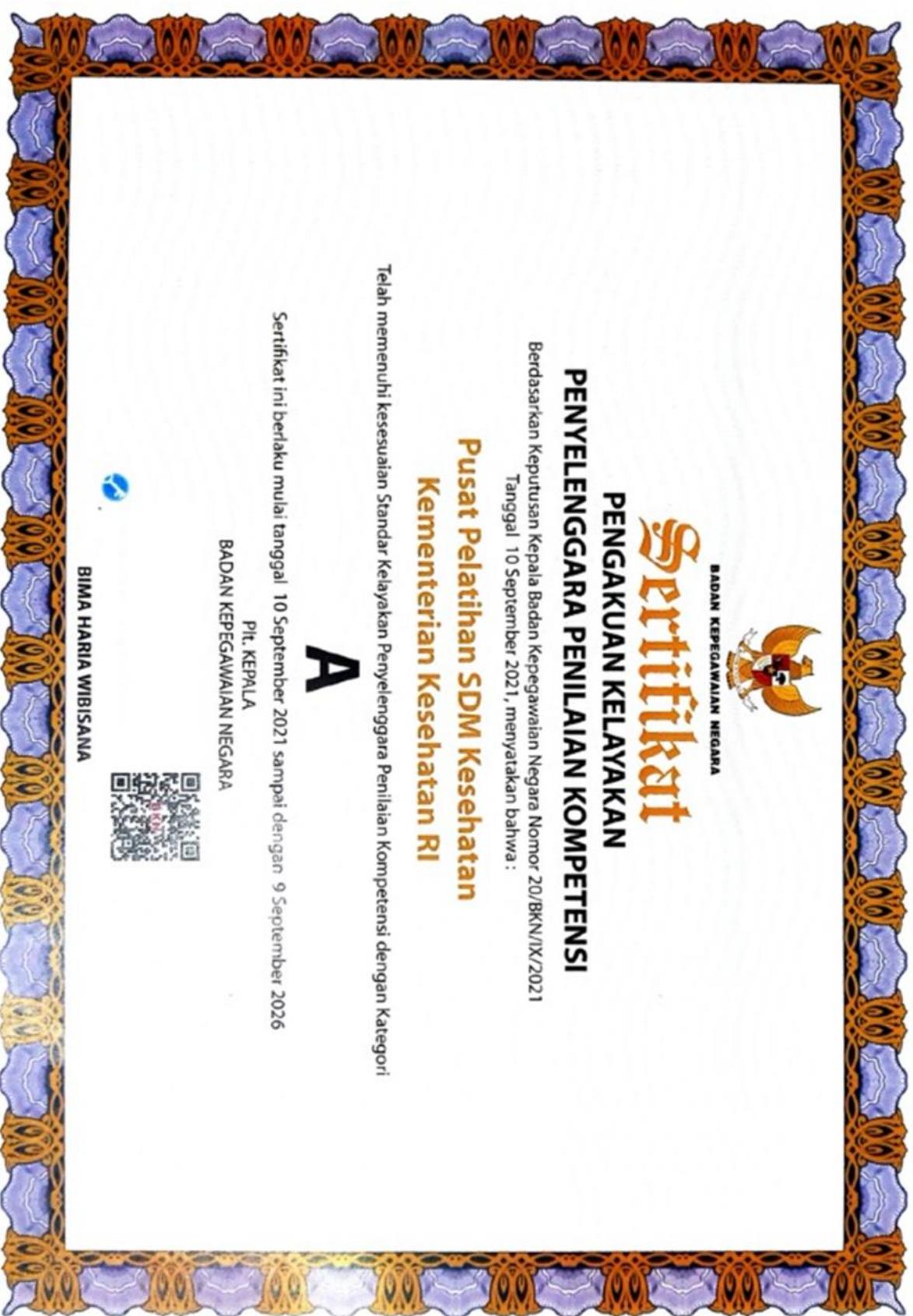
Dengan disusunnya Laporan Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang pencapaian kinerja serta output Pusat Pelatihan SDM Kesehatan selama tahun 2021.

### **LAMPIRAN**









BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# Sertifikat

## PENGAKUAN KELAYAKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/BKN/IX/2021

Tanggal 10 September 2021, menyatakan bahwa :

**Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI**

Telah memenuhi kesesuaian Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Kategori

# A

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan 9 September 2026

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BIMA HARIA WIBISANA



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT

Nomor : 1397/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

### **PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

sebagai Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan dibawah lingkungan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan serta Lembaga Pelatihan lainnya dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun,

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

Jakarta, 8 Juli 2021

KEPALA,

  
ADI SURYANTO



**RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN COVID-19  
WISMA ATLET KEMAYORAN**

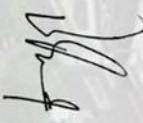
Nomor : SF.1/E.PL/1/XII/2021/Academy

**PENGHARGAAN**  
KEPADA :

**Pusat Pelatihan SDM Kesehatan**  
**Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN

JAKARTA, 07 DESEMBER 2021  
KOORDINATOR RS DARURAT PENANGANAN COVID-19  
WISMA ATLET KEMAYORAN

  
dr. Budiman, Sp.BP-RE (K), M.A.R.S.  
Mayor Jenderal TNI

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	8,497,500	0	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500	2,562,461,000	1,718,531,500
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	716,815,000	457,710,000	259,105,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
J U M L A H		5,006,305,000	3,020,171,000	1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes  
NIP 196504181989032002



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

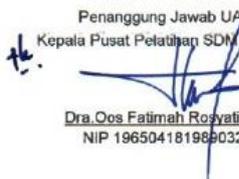
Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	8,497,500	0	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500	2,562,461,000	1,718,531,500
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	716,815,000	457,710,000	259,105,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
J U M L A H		5,005,305,000	3,020,171,000	1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oes Fatimah Rosyati, M.Kes  
NIP 196504181969032002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

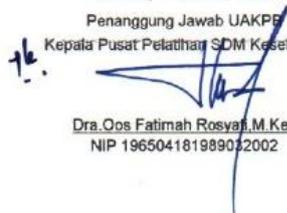
Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500
133111	Gedung dan Bangunan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 2,562,461,000)
162151	Software	716,815,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169315	Akumulasi Amortisasi software	( 457,710,000)
J U M L A H		1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M. Kes

NIP 196504181989012002